

Analisis Populasi Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Inflasi Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2023 (Studi Pada Provinsi Sumatera)

Nora Diana¹⁾, Ahmad Hazas Syarif²⁾, Nurhayati³⁾

Ekonomi Syariah, Uin Raden Intan Lampung

Email: noradiana532@gmail.com, _hazassyarif@radenintan.ac.id, Nurhayati@radenintan.ac.id

Abstrak

Ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera mempunyai perbedaan yang mencolok antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Elit kaya, seringkali terkonsentrasi di perkotaan, menikmati standar hidup yang tinggi, sementara sebagian besar masyarakat miskin, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyebab ketimpangan pendapatan di Sumatera mempunyai banyak aspek, termasuk distribusi sumber daya alam yang tidak merata, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang tidak memadai.

Penelitian ini bertujuan menganalisis populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera selama periode 2018-2023 ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dalam bentuk panel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 10 sebagai alat bantu analisis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah dengan nilai koefisien sebesar 0.041876. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.007385. Sedangkan inflasi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.006426. Secara bersama-sama antara variabel *independent* dan *dependent* pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan daerah mampu dijelaskan oleh populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi sebesar 6%.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Populasi Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi

Abstract

Income inequality on the island of Sumatra has a stark difference between the rich and the poor. The wealthy elite, often concentrated in urban areas, enjoy a high standard of living, while the vast majority of the poor, mostly living in rural areas, struggle to make ends meet. The causes of income inequality in Sumatra are multifaceted, including unequal distribution of natural resources, lack of access to education and health services, and inadequate economic opportunities.

This study aims to analyze the population, open unemployment rate and regional inflation on regional income inequality in the Sumatran provinces during the 2018-2023 period in terms of an Islamic economic perspective.

This research uses a type of quantitative research that is associative in nature. The type of data used in this study is secondary data in panel form. The sampling technique used is saturated sampling. The analysis used is panel data regression analysis using Eviews 10 as an analysis tool.

The results of the study show that the population variable has a positive and significant effect on regional income inequality with a coefficient value of 0.041876. The open unemployment rate variable has a positive and insignificant effect with a coefficient value of 0.007385. Meanwhile, regional inflation has a positive and insignificant effect with a coefficient value of 0.006426. Jointly between the independent and dependent variables in this study show results that have no significant effect. The results of this study indicate that regional income inequality can be explained by population, open unemployment rate and inflation by 6%.

Keywords: *Regional Income Inequality, Population Open Unemployment Rate, Inflation*

Pendahuluan

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan masyarakat atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah hal yang nyata yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat baik di negara maju maupun Negara berkembang dan merupakan suatu permasalahan penting untuk diatasi. Ketimpangan atau disparitas antar daerah yang terjadi di Indonesia disebabkan karena masing-masing wilayah mempunyai karakteristik kandungan alam yang berbeda dari segi sumber daya alam maupun dari segi demografi.

Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan kemampuan masing-masing wilayah untuk mendorong proses pembangunan. (Arfian, 2022)

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Dalam peningkatan kesejahteraan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabil dan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi pemerataan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, tidak hanya disebabkan karena adanya perbedaan pembangunan antara daerah, kualitas SDM, potensi SDA, letak wilayah geografis, etnis juga dapat menentukan ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan namun juga dapat berpotensi menjadi sumber ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga akan menimbulkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, karena tidak melihat tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Lebih besar / kecil mana tingkat pertumbuhan penduduknya jika dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Jika jumlah penduduk yang menganggur lebih banyak maka jumlah penduduk yang tidak menerima pendapatan/upah juga akan semakin meningkat, sehingga ketimpangan/gap antara penduduk kaya dan penduduk miskin akan semakin memburuk. (Hariani, 2019)

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang). Pada tabel 1.1 akan memperlihatkan bagaimana kondisi ketimpangan dalam distribusi pendapatan di seluruh provinsi yang ada Pulau Sumatera. Dimana ketidakmerataan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan tersebut diukur dengan Indeks Gini dari tahun 2018-2023.

Tabel 1.1 Data Ketimpangan Pendapatan Pulau Sumatera Tahun 2018-2023

Provinsi	Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	0,318	0,321	0,319	0,291	0,311	0,296
Sumatera Utara	0,311	0,315	0,314	0,313	0,316	0,309
Sumatera Barat	0,335	0,307	0,301	0,3	0,292	0,28
Riau	0,347	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324
Jambi	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335	0,343
Sumatera Selatan	0,341	0,331	0,338	0,34	0,33	0,338
Bengkulu	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315	0,333
Lampung	0,326	0,331	0,32	0,314	0,313	0,324
Kepulauan Bangka Belitung	0,272	0,262	0,257	0,247	0,225	0,245
Kepulauan Riau	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,34

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018-2023

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa data ketimpangan pendapatan antar provinsi di pulau Sumatera dari tahun 2018-2023 yang diukur dengan gini ratio mengalami perubahan fluktuatif. Dimana pada tahun terakhir di 2023 sepuluh provinsi yang terdapat di pulau Sumatera dengan wilayah ketimpangan pendapatan tertinggi yaitu provinsi Kepulauan Jambi dengan gini ratio 0,343. Sedangkan kategori wilayah ketimpangan pendapatan terendah berada di provinsi Sumatera Barat dengan gini ratio 2,80 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera masih relative rendah dan bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan termasuk isu penting untuk ditinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari

pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

Salah satu indikator yang memengaruhi ketimpangan pendapatan daerah yaitu populasi penduduk. Penduduk merupakan modal awal dari pembangunan ekonomi, jumlah penduduk yang tinggi apabila tidak diiringi dengan kualitas manusia yang baik maka hanya akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi, begitupun sebaliknya apabila jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan kualitas manusia yang baik maka akan menjadi nilai tambah yang mendorong pembangunan menjadi jauh lebih baik. Bertambah banyaknya jumlah penduduk akan berpotensi menaikkan tingkat kesenjangan di beberapa tingkat masyarakat, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah berkurangnya kesempatan dalam mencari pekerjaan. Semakin banyak jumlah penduduk tentunya seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia di negara tersebut, apabila jumlah kesempatan bekerja tidak seimbang dengan angkatan kerja yang tersedia maka akan terjadi peningkatan angka kesenjangan dalam masyarakat.

Menurut Murty agar proses pembangunan dalam suatu negara dapat dicapai sesuai sasaran, partisipasi penduduk dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi negara dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan pembangunan ekonomi Selain jumlah penduduk juga distribusi penduduk yang serasi diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional diukur dari hasil produksi menurut sektor dan pembangunan kependudukan nasional dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah dicerminkan oleh alokasi ekonomi berbagai wilayah dan kapasitas penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan sejumlah sumberdaya penduduk yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Antara pembangunan ekonomi nasional

dan pembangunan kependudukan nasional terdapat pengaruh timbal balik atau mempengaruhi satu sama lainnya.

Masalah populasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera melibatkan beberapa faktor yang pertama, Distribusi Ekonomi yang Tidak Merata Sumber yang disebabkan oleh daya ekonomi dan kesempatan kerja sering kali terpusat di daerah-daerah tertentu, seperti kota besar atau wilayah dengan industri utama. Hal ini menyebabkan disparitas besar dalam pendapatan antara daerah yang berkembang dan yang kurang berkembang. yang kedua ketergantungan pada sektor tertentu, banyak daerah di Sumatera tergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan kelapa sawit atau pertambangan. ketergantungan ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, terutama jika harga komoditas tersebut fluktuatif. (Nurlaili, 2016)

Ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan oleh tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi tingkat pengangguran menandakan bahwa kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, dan semakin rendah tingkat pengangguran menandakan kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi. (Istikharoh, 2020)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan masyarakat dengan usia kerja, sedang mencari kerja maupun belum memperoleh pekerjaan. Timbulnya pengangguran terbuka disebabkan karena lapangan pekerjaan dengan jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan oleh angkatan kerja sehingga hal tersebut tidak sepadan dan pada umumnya pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. selain itu penyebabnya penurunan pendapatan individu, kesenjangan ekonomi antar wilayah karena adanya perbedaan anatara daerah perkotaan dan perdesaan serta antara provinsi yang lebih maju dan yang kurang berkembang Seperti teori yang dikemukakan Kuncoro bahwa pengangguran terbuka terjadi karena adanya perpindahan penduduk pada suatu daerah ke daerah lain dengan perekonomian yang lebih besar, di mana dengan bertambahnya penduduk tersebut akan mengakibatkan besarnya ketimpangan karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Sehingga dengan keadaan tersebut hanya ada sebagian saja dari angkatan kerja yang

mendapatkan pekerjaan dan akan mengakibatkan timbulnya pengangguran serta terjadinya ketimpangan pendapatan. Namun sebaliknya jika daerah yang diimbangi dengan kesempatan kerja maka perekonomian pada suatu daerah akan mengalami peningkatan. Hal ini, mengindikasikan adanya permasalahan peluang tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan. Dimana, fenomena kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap menjadi permasalahan yaitu pengangguran. Harapannya pemerintah lebih bisa mengatasi masalah pengangguran ini dengan memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain populasi penduduk dan tingkat pengangguran terbuka yang termasuk indikator yang memengaruhi ketimpangan pendapatan daerah yaitu Inflasi daerah. . Inflasi daerah mengacu pada kenaikan harga yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti peneliti mengambil di wilayah/provinsi yang ada di pulau Sumatera. Inflasi merupakan permasalahan dalam perekonomian yang selalu menjadi perhatian pemerintah dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan untuk menekan angka pertumbuhannya Hal ini disebabkan karena inflasi dapat berpengaruh tidak baik bagi perekonomian jika mencapai angka yang terlalu tinggi. Negara akan membuat kebijakan ekonomi dengan tujuan mempertinggi dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai inflasi yang rendah dan terkendali. Inflasi sendiri merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa pada periode waktu tertentu karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. (Adu-Gyamfi, 2020)

Inflasi memiliki dampak positif dan negative bagi perekonomian. Dampak positifnya, inflasi dapat menyebabkan sehingga produksi barang bertambah karena lebih cepatnya peredaran dan perputaran barang. Sehingga kesempatan kerja bertambah karena bertambahnya investasi dan mengurangi pengangguran. Dampak positif tersebut dapat terjadi jika inflasi terkendali serta diikuti dengan pendapatan riil yang meningkat karena pendapatan nominal masyarakat pun meningkat. Sedangkan

dampak negative dari inflasi yaitu turunnya nilai mata uang sehingga minat menabung ataupun investasi berkurang, dan terhentinya pembangunan yang sedang berlangsung.

Selain itu, gejala global juga dapat mempengaruhi meningkat inflasi. Optimisme terhadap perbaikan ekonomi telah tumbuh di sejumlah negara maju yang menyebabkan perbaikan pada sisi suplai, tetapi sisi produksi belum membaik sehingga terjadi kenaikan inflasi. Harga kelompok pangan dan energi sangat melonjak dikarenakan gangguan pasokan akibat perang Ukraina. Sehingga banyak negara mengalami inflasi dengan sangat tinggi. Optimalisasi kemampuan APBN sebagai peredam guncangan dapat mengurangi transmisi dampak inflasi tinggi secara global ke tingkat domestik. Inflasi domestik Indonesia tetap terjaga pada tingkat yang logis yaitu di tahun 2022, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan pemulihan ekonomi. (Puspasari, 2023)

Berdasarkan pemaparan mengenai ketimpangan pendapatan daerah, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi daerah diatas dapat dijadikan peneliti sebagai landasan dalam melakukan penelitian mendalam mengenai hal-hal yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai analisis populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi daerah terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Dalam penelitian, peneliti akan membahas secara nasional yakni sepulau sumatera. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk panel yaitu 6 tahun terakhir. Maka disusunlah penelitian ini dengan judul **“Analisis Populasi Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2023 di Provinsi Pulau Sumatera”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif Data panel adalah gabungan antara data cross section dengan data runtun waktu (time series). Yang bersifat asosiatif. Tujuan dari penelitian asosiatif adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dari dua variabel atau lebih, atau untuk mengungkap bentuk atau tingkat hubungan variabel yang diselidiki tanpa manipulasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

data sekunder dalam bentuk panel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 10 sebagai alat bantu analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Analisis Data Panel

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah terhadap ketimpangan pendapatan daerah yaitu data time series tahun 2018-2023 dan data cross section pada 10 provinsi Sumatera. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan aplikasi EViews 10.

b. Uji Spesifikasi Model

Pemilihan model terbaik dalam data panel terdapat 3 pendekatan model yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model terbaik dalam estimasi data panel ini menggunakan uji chow, uji hausman dan uji largange multiplier (LM). Berikut adalah hasil pengujian :

a) Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Berikut merupakan hasil dari uji chow:

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.261904	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	118.259671	9	0.0000

Sumber: EViews 10 (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengujian uji chow memperoleh cross-section Chi-square dengan nilai probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

b) Uji Husman

Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengujian uji chow memperoleh cross-section Chi-square dengan nilai probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	8.438337	3	0.0378

Sumber: EViews 10 (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian uji hausman diperoleh cross-section Random dengan nilai probabilitas adalah $0.0378 < 0,05$. Sehingga

dapat disimpulkan model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

c) Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Berikut merupakan hasil uji hausman:

Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section		
	One-sided	Period	Both
Breusch-Pagan	90.92030 (0.0000)	0.206863 (0.6492)	91.12717 (0.0000)
Honda	9.535214 (0.0000)	-0.454822 (0.6754)	6.420807 (0.0000)
King-Wu	9.535214 (0.0000)	-0.454822 (0.6754)	5.333712 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	90.92030 (0.0000)

Sumber: EViews 10 (data diolah 2024)

Berdasarkan tabel 4.4 hasil pengujian uji Lagrange Multiplier (LM) diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan adalah $0,0000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, diantaranya Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange-Multiplier maka model terbaik dalam penelitian

ini adalah Random Effect Model (REM) untuk menganalisis populasi penduduk, tingkat pengguran terbuka dan inflasi daerah terhadap ketimpangan pendapatan daerah provinsi sesumatera.

c. Pengujian Hipotesis

1) Secara Parsial (Uji t)

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 4.5 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.664054	0.063960	-10.38228	0.0000
PP	0.041876	0.016070	2.605934	0.0117
TPT	0.007385	0.044244	0.166913	0.8680
IFD	0.006426	0.020534	0.312956	0.7555

Sumber : EViews 10 (data diolah 2024)

- Hasil uji t pada variabel populasi penduduk diperoleh nilai t hitung sebesar 2.605934 lebih besar dari t tabel 2.001717484 dengan signifikansi 0.0117 lebih kecil dari 0,05, maka variabel populasi penduduk memiliki arah hubunga negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan daerah (Y).
- Hasil uji t pada variabel tingkat penggura terbuka diperoleh nilai t hitung sebesar 0.166913 lebih kecil dari t tabel 2.001717484 dengan signifikansi 0.8680 lebih besar dari 0,05, maka variabel tingkat pengguran terbuka memiliki arah hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan daerah (Y).
- Hasil uji t pada variabel inflasi daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 0.312956 lebih kecil dari t tabel 2.001717484 dengan signifikansi 0.7555

lebih besar dari 0,05, maka variabel inflasi daerah memiliki arah hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan daerah (Y).

2) Uji Bersama-Sama (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6 Hasil Uji F

R-squared	0.114782
Adjusted R-squared	0.067360
S.E. of regression	0.037832
Sum squared resid	0.080152
Log likelihood	113.4089
F-statistic	2.420418
Prob(F-statistic)	0.075572

Sumber : EViews 10 (data diolah 2024)

Nilai F hitung sebesar 2.420418 lebih kecil dari F tabel 2.76943093 dan nilai signifikansi 0.0755772 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan daerah.

3) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat menunjukkan seberapa besar perubahan variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh perubahan variasi variabel bebas. Berikut hasil dari koefisien determinasi :

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Derminasi

R-squared	0.114782
Adjusted R-squared	0.067360
S.E. of regression	0.037832
Sum squared resid	0.080152
Log likelihood	113.4089
F-statistic	2.420418
Prob(F-statistic)	0.075572

Sumber : EViews 10 (data diolah 2024)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil regresi data panel dengan menggunakan Random Effect Model (REM) diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,067360 (6%) yang berarti variabel ketimpangan pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh variabel populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah 6% sedangkan 94% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi sumatera tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, variabel populasi penduduk (X1) diperoleh nilai koefisien sebesar $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.605934 > 2.001717484$) dengan arah koefisien yang positif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar $0.0117 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini populasi penduduk memiliki arah koefisien positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi sumatera. Hasil koefisien regresi pada variabel populasi penduduk sebesar 0.041876 hal ini menunjukkan apabila variabel populasi penduduk mengalami peningkatan 1% ,maka variabel

ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.041876%.

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk suatu daerah tidak disertai dengan pengembangan kualitas SDM sehingga akan menyebabkan persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan semakin ketat sehingga akan menyebabkan pengangguran dan semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan. (Erlina Dwi Rhmawati, 2024)

Jumlah penduduk bagi pemerintah daerah merupakan rencana pembangunan yang dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan sekaligus juga beban pembangunan. Jumlah penduduk sebagai aset modal pembangunan apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. (Suprianto, 2017) Jumlah penduduk yang besar menghasilkan angkatan kerja yang besar yang berpotensi meningkatkan pendapatan nasional namun memerlukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia agar kualitas modal manusia mengalami perbaikan sebagai prasyarat untuk menuju tahap tinggal landas dari suatu perekonomian.

b. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, variabel tingkat pengangguran terbuka (X₂) diperoleh nilai koefisien sebesar $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.166913 < 2.001717484$) dengan arah koefisien yang positif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar $0.8680 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tingkat pengangguran terbuka memiliki arah koefisien positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera. Hasil koefisien regresi pada variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.007385 hal ini menunjukkan apabila variabel tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 1% ,maka variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.007385 %.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Secara teori, pengangguran tinggi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketika banyak orang tidak bekerja, mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil, sehingga jurang pendapatan antara yang bekerja dan tidak bekerja semakin melebar. Orang yang tetap bekerja mungkin memiliki pendapatan yang stabil atau bahkan meningkat, sementara mereka yang menganggur mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin nyata dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut Sjafrizal, pengangguran menjadi salah satu parameter penting yang digunakan dalam mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat daerah. Tingginya pengangguran membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah, begitupun sebaliknya. Jadi, semakin tinggi pengangguran membuat semakin banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan, karena akan menurunkan tingkat gaji golongan tenaga kerja yang berpendapatan rendah, akibatnya ketimpangan pendapatan meningkat. Dalam hal ini, pengangguran menggunakan indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka),

karena dalam ilmu demografi, tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan masuk dalam kategori angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pendapat di atas didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ali, Ansari Samani & Khilkordi dengan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Dampak negatif dari ketimpangan adalah karena semakin sedikitnya kesempatan bagi pekerja dan pengusaha sehingga semakin besar kemungkinan terjadinya pengangguran. Ketimpangan akan mempengaruhi pekerja berpenghasilan rendah dan mereka memiliki risiko eksploitasi majikan yang lebih tinggi, penurunan produktivitas karena ketidakamanan pendapatan, daya beli yang lebih rendah, dan permintaan konsumen akan barang dan jasa yang mengalami penurunan. Dengan begitu maka, sudah terlihat jelas bahwa antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan satu sama lain, karena jumlah pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan suatu wilayah/negara, begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan tentunya akan mempengaruhi pekerjaan, karena sedikitnya kesempatan bagi pekerja dan pengusaha. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu temuan penelitian dilakukan oleh Rego yang memperoleh hasil bahwa pengangguran memiliki dampak yang positif pada ketimpangan pendapatan. (Haryono, 2023)

c. Pengaruh inflasi daerah pada provinsi sumatera tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, variabel inflasi daerah (X3) diperoleh nilai koefisien sebesar $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.312956 < 2.001717484$) dengan arah koefisien yang positif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf

signifikan sebesar $0.7555 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini inflasi daerah memiliki arah koefisien positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera. Hasil koefisien regresi pada variabel inflasi daerah sebesar 0.006426 hal ini menunjukkan apabila variabel inflasi daerah mengalami peningkatan 1% ,maka variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.006426%.

Secara umum inflasi dapat di artikan sebagai kenaikan tingkat harga secara terus – menerus yang dapat mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Menurut Rukmana, inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat menimbulkan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, inflasi yang tinggi menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat terutama bagi pekerja yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Namun, menurut Rahman, ketika inflasi meningkat, pengeluaran penduduk perkotaan akan meningkat, sedangkan di pedesaan pendapatan akan meningkat, yang mengakibatkan penurunan koefisien Gini. Diperkirakan bahwa penurunan ketimpangan disebabkan oleh kenyataan bahwa penduduk pedesaan memasok barang-barang yang diperlukan di kota, oleh karena itu dengan peningkatan inflasi akan ada peningkatan pendapatan singkatnya, penurunan pendapatan masyarakat penduduk perkotaan dan peningkatan pendapatan penduduk pedesaan karena inflasi diyakini menjadi alasan logis mengapa ketimpangan distribusi pendapatan berkurang.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.5 variabel berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan inflasi belum tentu menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Inflasi pada dasarnya merupakan kenaikan harga atas barang dan jasa, jika dimaknai inflasi dapat menyebabkan kesenjangan antara masyarakat berpenghasil kecil dan tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perilaku individu atau masyarakat dengan tetap mengkonsumsi barang atau jasa meskipun harus berhutang atau melakukan kredit pinjaman untuk konsumsi dan perilaku yang dengan mengganti kombinasi

barang yang dikonsumsi yang dikarenakan adanya perubahan harga yang mengalami peningkatan untuk maka daya beli masyarakat akan tetap terjaga sehingga tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan

Pada penelitian ini dapat ditemukan hal serupa yang mana inflasi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di pulau Sumatera. Penelitian ini sama dengan penelitin Cardoso,,Kardita Siami-Namin & Hudson, yang mengatakan terdapat korelasi positif antara inflasi terhadap ketimpangan pendapatan yang dapat diartikan kenaikan nilai inflasi menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Hal ini mungkin karena kenaikan inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan permintaan barang dan jasa, mengurangi lapangan kerja produsen, dan meningkatkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. (Putri, 2021)

d. Pengaruh populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera periode 2018-2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan regresi data panel dengan metode Random Effect Model, Secara simultan (bersama-sama) ketiga variabel independen berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa hasil Uji F, pada kolom Prob(F-statistic) diperoleh Nilai F_{hitung} sebesar 2.420418 lebih kecil dari nilai F_{tabel} yaitu 2.76943093 dan nilai signifikansi yaitu 0.075572 lebih besar dari 0,05, yang artinya secara simultan tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan dapat diartikan bahwa penurunan yang terjadi tidak terlalu mempengaruhi atau berpengaruh lemah anatar pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel independent dalam penelitian ini mampu menjelaskan

variabel dependent atau ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 6% sedangkan sisanya sebesar 94% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi daerah tidak signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan daerah berarti bahwa meskipun secara individu variabel-variabel ini mungkin memiliki pengaruh, secara bersama-sama mereka tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi di pulau Sumatera pada periode tersebut.. Meskipun ketiga variabel tersebut berperan penting dalam perekonomian regional, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek gabungan dari ketiga faktor ini terhadap ketimpangan distribusi pendapatan tidak cukup kuat untuk menghasilkan perubahan yang signifikan.

e. Pengaruh populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Sumatera periode 2018-2023.

Masalah ketimpangan pendapatan terus menjadi pembahasan setiap negara terutama negara berkembang khususnya negara Indonesia. Awal kemunculan masalah kemiskinan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Apabila kedua masalah ini dibiarkan berlarut – larut maka akan semakin memperparah keadaan, dan dapat timbulnya konsekuensi negative terhadap kondisi sosial serta politik. Seperti dinyatakan dalam Chrisamba, bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan soial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis.

Secara sosial, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Kelompok yang lebih miskin mungkin

merasa terpinggirkan atau dirugikan, yang bisa menyebabkan ketidakpuasan, konflik, dan ketegangan sosial. Di bidang politik, ketidakmerataan pendapatan bisa memicu ketidakstabilan. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil mungkin mulai menuntut perubahan atau mempertanyakan keadilan sistem politik yang ada. Ini bisa mengarah pada konflik politik atau tantangan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam hal keamanan, ketidakadilan ekonomi dapat meningkatkan risiko kerusuhan atau kekacauan. Ketidakpuasan yang mendalam bisa memicu aksi-aksi kekerasan atau bahkan gerakan separatis, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin berusaha memisahkan diri dari negara atau melawan pemerintah jika mereka merasa sangat dirugikan.

Jadi, kegagalan dalam pemerataan pendapatan tidak hanya menyebabkan masalah di sektor ekonomi, tetapi juga dapat memicu masalah yang lebih luas di bidang sosial, politik, dan keamanan.

Dalam upaya menciptakan kesejahteraan penduduk dan untuk mencukupi pemenuhan kebutuhannya, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Hal ini sesuai dengan surat Q.S. At-Takatsur ayat 1-2:

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ

Artinya :

“Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Dalam perspektif ekonomi Islam, populasi penduduk dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, produksi, dan pengeluaran suatu negara. Jika populasi penduduk tinggi, maka dapat meningkatkan konsumsi dan produksi, namun juga

dapat meningkatkan pengeluaran dan biaya hidup . Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tingkat pertumbuhan populasi masyarakat dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian Islam.

Dari sudut pandang Islam, pengangguran dipandang sebagai bentuk kemiskinan dan kesulitan yang tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga keluarga mereka. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 62 yaitu:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki) baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Konsep Islam tentang "zakat" (amal) merupakan mekanisme penting untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Zakat merupakan amal wajib yang dibayarkan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat sebagai tanda ketidakadilan ekonomi yang perlu ditangani.

Dari sudut pandang Islam, inflasi dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang lebih parah menimpa orang miskin dan rentan daripada orang kaya. Seperti yang di jelaskan dalam surah al-isra ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dalam konteks ini, konsep Islam tentang "adl" (keadilan) berperan. Umat Islam didorong untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terpinggirkan. Dari sudut pandang Islam, ketimpangan pendapatan dipandang sebagai masalah penting yang tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran menyatakan, Dan orang-orang yang tamak akan kehidupan dunia, akan melupakan kehidupan akhirat.

Di samping itu, sistem distribusi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan falah sebagai tujuan akhir. Fokus utamanya adalah pada distribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Distribusi ekonomi dalam Islam berakar pada nilai-nilai manusiawi yang mendasar dan penting, seperti keadilan dan kebebasan.

a. Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan fondasi kuat yang meliputi semua ajaran Islam dan rukun Islam. Islam memperhatikan larangan terhadap kezaliman sebagai isu utama dalam keadilan. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan merupakan sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai jika tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral. Oleh karena itu, penting untuk memperdalam etika ekonomi dan menjadikan konsep moral sebagai faktor internal yang mempengaruhi perekonomian.

b. Nilai Kebebasan

Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun, kebebasan yang diatur dalam Islam dalam konteks ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali. (Bambang, 2019)

Karena manusia memiliki kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan berujung pada

penimbunan kekayaan secara berlebihan. Maka, kecenderungan manusia tersebut dalam Islam, harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong perkembangan perniagaan dan partisipasi sosial melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kepentingan bersama. Hal ini tentu diharapkan agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin di masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Populasi Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode Tahun 2018-2023 Pada Provinsi Sumatera. Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Populasi penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera tahun 2018-2023. Hasil koefisien regresi pada variabel populasi penduduk sebesar 0.041876 hal ini menunjukkan apabila variabel populasi penduduk mengalami peningkatan 1% ,maka variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.041876%. Hasil ini sesuai hipotesis dalam penelitian.
2. Tingkat Pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera. Hasil koefisien regresi pada variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.007385 hal ini menunjukkan apabila variabel tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 1% ,maka variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.007385 %. Hasil ini sesuai tidak hipotesis dalam penelitian.
3. Inflasi daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada provinsi Sumatera. Hasil koefisien regresi pada variabel inflasi daerah sebesar 0.006426 hal ini menunjukkan apabila variabel inflasi daerah

mengalami peningkatan 1% ,maka variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.006426%. Hasil ini sesuai tidak hipotesis dalam penelitian.

4. Secara bersama-sama populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di provinsi sumatera tahun 2018-2023. Jika terjadi perubahan pada populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi daerah bersama-sama tidak merubah ataupun hanya kecil merubah ketimpangan pendapatan daerah di provinsi sumatera tahun 2018-2023.
5. Ketimpangan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah isu yang sangat diperhatikan karena bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Ekonomi Islam tidak hanya melihat ketimpangan pendapatan sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral dan spiritual yang memengaruhi kesejahteraan umat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, perspektif ekonomi Islam mengenai ketimpangan pendapatan sangat jelas menekankan pada pentingnya keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan pendapatan dipandang sebagai masalah yang harus diatasi melalui berbagai instrumen ekonomi Islam yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama.

A. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, akan disampaikan rekomendasi atau saran dari peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak terkait, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah di provinsi-provinsi di Sumatera perlu memperkuat infrastruktur ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan populasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran. Perlu adanya kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pengangguran, seperti program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga perlu menerapkan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk stabilitas harga barang-barang pokok.
2. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf perlu diperkuat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan lebih dalam ke dalam sistem ekonomi daerah. Penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan guna memastikan tujuan pengurangan ketimpangan pendapatan tercapai dengan baik.
3. Dalam penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, maka penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian dengan menggunakan data terbaru, baik dalam bentuk *time series*, *cross section* maupun panel. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel penelitian agar pembahasan dapat dilakukan lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Adu-Gyamfi, G. (2020). Keterbukaan Pedagang, Inflasi dan Pertumbuhan PDB: Bukti Data Panel dari sembilan Negara Afrika Barat. *Jurnal Terbuka Bisnis dan Manajemen*, 314-28.
- Arfian, L. H. (2022). Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Progres Ekonomi Pembangunan*.

- Bambang, J. a. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Diniyah 121.
- Erlina Dwi Rhmawati, d. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan*.
- Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *Jurnal of Applited Business Tijab*, 1-11.
- Haryono, F. A. (2023). Pengaruh Foreign Direct Invesment, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Curroption Perception Index Sebagai Variable Moderasi . *Jurnal Megister Ekonomi Syariah*, 37-50.
- Istikharoh, W. J. (2020). Analisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat penganggura terhadap ketimpangan pendapatan di daerah Istimewa yogyakarta tahun 2008-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economi*, 109.
- Nurlaili, A. (2016). *Analisi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Puspasari, R. (2023). Siaran Per: Kinerja Baik APBN Antar Ekonomi Tahun 2022 Tumbuh 5,3% di Tengah Tekanan Global. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia* .
- Putri, R. R. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 37.

Analisis Populasi Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2023 (Studi Pada Provinsi Sumatera)

Nora Diana, Ahmad Hazas Syarif, Nurhayati

Suprianto. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sumabawa Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 187-204.